

**MANIPULASI BUDAYA DALAM POLITIK  
PADA PEMEKARAN DAERAH:  
Studi Kasus di Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan<sup>1</sup>**

**Oleh: Yulianus Pongtuluran<sup>2</sup>,  
Ichlasul Amal<sup>3</sup>, Erwan Agus Purwanto<sup>4</sup>**

**ABSTRACT**

*This research about cultural manipulation in local politic, Toraja, South Sulawesi. The purpose of this study was to determine the local cultural forms are manipulated by local political elites to achieve their political objectives. The methodology used in this study is descriptive qualitative, with the determination of key informants through snowball sampling. The research results showed there has been manipulation of culture by utilizing culture (traditional parties, burial ceremonies, traditional houses, houses of worship, and cultural symbols) as a political instrument to achieve political goals and is used as one reasons in regional expansion.*

*Key Words: Cultural manipulation, local politics, regional autonomy.*

**PENDAHULUAN**

• **Latar Belakang**

Kabupaten Tana Toraja adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terkenal dengan ritual-ritualnya yang unik. Tidak heran bila Kabupaten Tana Toraja ditetapkan sebagai salah satu tempat pariwisata yang paling banyak diminati oleh wisatawan dalam negeri ataupun wisatawan mancanegara. Budaya asli Toraja yang dilandaskan pada pola kepercayaan lama (*aluk todolo*) di mana norma-norma dan seluruh aturan beserta sanksinya, diyakini masyarakat

Toraja berasal dari langit yang diturunkan ke bumi melalui tangga (*eran dilangi*) sehingga manusia harus mematuhinya (Palebangan, 2007 : 66). Budaya kepercayaan lama (*aluk todolo*) menjadi pedoman hidup masyarakat Toraja dan sangat berakar dalam menjalani kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa yang diwariskan secara turun temurun.

Artikel ini merupakan ringkasan dari disertasi penulis

<sup>2</sup> Staf pada Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional) Republik Indonesia dan mahasiswa S-3 Ilmu Politik pada Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

<sup>3</sup> Promotor disertasi dan gurubesar Universitas Gadjah Mada

<sup>4</sup> Co Promotor disertasi dan staf pengajar pada Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Mencermati budaya Toraja tidak lepas dari sejarah asal usul munculnya istilah kata Toraja. Toraja dalam kamus bahasa Toraja disebut *Toraa* atau *Toraya*. *Toraa* terdiri atas dua kata yaitu *to* berarti orang dan *raa* berarti murah. Jadi *Toraa* berarti orang pemurah hati dan penyayang. Kata *Toraya* terdiri atas *to* yang berarti orang dan *raya* berarti raja atau terhormat, sehingga *Toraya* berarti "orang terhormat" atau "raja". Itulah sebabnya banyak orang berpendapat bahwa *Toraa* adalah "manusia yang rendah hati, sederhana, penyayang, murah hati, demokratis, dan orang besar atau tempat asal raja-raja" (Kalua, et al, 2010 : 5).

Adat istiadat masyarakat Toraja yang berupa ritus-ritus adalah merupakan warisan budaya yang berasal dari nenek moyang mereka yang dulunya merupakan keyakinan (agama). Budaya yang begitu kental dan mendasar tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Toraja memegang teguh budaya yang telah diwariskan sejak dulu. Seiring dengan meningkatnya pendidikan dan ekonomi serta banyaknya masyarakat Toraja yang merantau dan berhasil di luar Toraja, maka pergeseran budaya khususnya dalam ritus-ritus masyarakat mulai berubah.

Dalam perkembangannya, budaya Toraja mulai mengalami perubahan seiring

dengan kedatangan orang-orang Eropa terutama dari Belanda dan pedagang-pedagang dari Arab memasuki wilayah Sulawesi Selatan, hingga ke Toraja. Kedatangan orang Eropa dan orang Arab membawa misi yang berbeda. Orang Eropa khususnya dari Belanda yang disebut dengan Zending datang membawa agama baru yaitu agama Kristen, sementara pedagang-pedagang Arab pada umumnya datang membeli hasil bumi yaitu rempa-rempa disamping menyebarkan agama Islam. Menguatnya agama Kristen dan Agama Islam di Toraja, menyebabkan aliran kepercayaan "*Aluk Todolo*" (kepercayaan lama) berubah makna dalam pelaksanaannya menjadi adat istiadat atau tradisi yang diwariskan secara turun temurun.

*Aluk* atau keyakinan mencakup kepercayaan, upacara-upacara peribadahan menurut cara-cara yang telah ditetapkan berdasarkan ajaran agama yang bersangkutan, adat-istiadat, dan tingkah laku sebagai ungkapan kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari (Kobong et al, 1992 : 5). *Aluk* yang telah dimanifestasikan dalam bentuk ritus-ritus budaya diantaranya adalah ritus pesta adat (*rambu tuka'*) dan ritus upacara penguburan (*rambu solo'*), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan

masyarakat Toraja hingga saat ini. Bahkan ke dua ritus budaya tersebut telah menjadi komoditas politik oleh elit-elit politik lokal untuk mempengaruhi masyarakat dalam mewujudkan ambisi pribadi atau kelompoknya. Manipulasi budaya yang dilakukan oleh elit-elit politik lokal, saat ini bukan saja merubah makna budaya itu sendiri, tapi juga telah merupakan alat politik untuk mendapatkan posisi atau prestise dalam masyarakat. Masyarakat dengan mudah dipengaruhi dan diatur oleh elit-elit lokal ataupun elit-elit Toraja yang bermukim di luar Toraja untuk mewujudkan tujuan politiknya tanpa disadari oleh masyarakat.

Persaingan politik dalam budaya khususnya dalam adat tidak sedikit menimbulkan konflik. Pada umumnya konflik yang muncul adalah konflik yang disfungsi yang menyebabkan perpecahan dalam kelompok masyarakat. Masyarakat Toraja perantau, menganggap dirinya sebagai orang yang berpandangan politik yang lebih luas dan moderen dan mempunyai cukup kemampuan (modal) untuk bersaing dalam pemilihan kepemimpinan di daerah. Bagi masyarakat Toraja yang menetap di Toraja dianggapnya sebagai masyarakat yang berpandangan sempit dengan

mempertahankan budaya tradisional yang kental (memiliki kompetensi terbatas).

Reformasi politik yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1997 telah mengubah sistim perpolitikan yang memberi ruang bagi elit-elit politik lokal di daerah tampil dengan menyuarakan langsung aspirasi politiknya bersama-sama dengan masyarakat untuk melakukan pemekaran atau pembentukan daerah baru terpisah dari kabupaten induknya. Munculnya sistem multi partai dipandang oleh sebagian besar masyarakat sebagai peluang untuk ikut langsung terlibat dalam berbagai proses demokratisasi dengan memilih langsung pemimpinnya, atau mendirikan partai politik sebagai kendaraan menuju kompetisi pemilihan kepemimpinan baik dalam skala lokal (daerah) maupun skala nasional.

Di Tana Toraja beberapa elit politik yang kurang mendapat tempat di pusat atau provinsi, memilih untuk kembali ke daerah asalnya masing-masing untuk berkompetisi dengan elit-elit lokal yang ada di daerah dalam memperebutkan posisi kepemimpinan daerah.

#### • **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan "Bagaimana

budaya lokal dimanipulasi untuk mewujudkan tujuan politik?"

- **Kerangka Teori**

- 1. Teori Kebudayaan**

Setiap daerah atau etnik mempunyai kebudayaan masing-masing yang mencerminkan cara pandang dalam berinteraksi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Ihromi (1984 : 21 – 22) merumuskan kebudayaan sebagai seperangkat kepercayaan, nilai-nilai dan cara berlaku (kebiasaan) yang dipelajari dan pada umumnya dimiliki bersama oleh warga dari suatu masyarakat (sekelompok orang) yang tinggal di suatu wilayah dan memakai suatu bahasa umum yang biasanya tidak dimengerti oleh penduduk tetangganya. Menurut Ralph Linton yang dikutip oleh Ihromi (1984 : 17), kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat yang manapun dan tidak hanya mengenai sebagian dari cara hidup itu yaitu bagian yang oleh masyarakat lebih tinggi atau lebih diinginkan.

Selanjutnya Clifford Geertz (1995 : 3) mengemukakan bahwa kebudayaan adalah suatu pola makna-makna yang diteruskan secara historis yang terwujud dalam simbol-simbol, suatu sistem konsep yang diwariskan yang terungkap dalam bentuk-bentuk simbolis yang dengannya manusia berkomunikasi, melestarikan, dan

memperkembangkan pengetahuan mereka tentang kehidupan dan sikap-sikap terhadap kehidupan.

Koentjaraningrat dalam Sudarsono dan Ranuwiyanto (1999 : 12) mengatakan bahwa budaya adalah keseluruhan sistim gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Budaya dapat memberi arah kepada masyarakat untuk berfikir dan bertindak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang terpelihara secara turun temurun.

Berdasarkan defenisi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa budaya merupakan sesuatu yang disepakati bersama dan mengandung nilai-nilai luhur sebagai gambaran hidup bermasyarakat, dan berbangsa. Dapat juga dikatakan bahwa budaya mencakup seluruh norma-norma yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam suatu komunitas termasuk aturan-aturan yang tidak tertulis namun merupakan kesepahaman masyarakat yang dipegang secara terus menerus. Norma-norma tersebut antara lain keyakinan, aturan-aturan, hukum, kebiasaan-kebiasaan yang secara turun temurun dijadikan pijakan dalam bertindak, bersikap, dan berperilaku.

## 2. Budaya Politik

Budaya politik sering dimaknai sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, serta sikap terhadap peranan warga negara dalam sistem tersebut (Upe, 2008: 103). Almond dan Verba (1990) mengatakan bahwa budaya politik yang muncul di Negara Barat sebagai akibat dari pembangunan politik secara bertahap (berdasarkan sejarah dan karakteristik budaya warganya) yang dikembangkan sebagai perpaduan dari pola dan sikap. Almond dan Verba membedakan tiga jenis orientasi warga negara dalam budaya politik yaitu: (1) Parokial (*Parochial*) yaitu politik yang belum bergerak (*political sleepwalker*), tidak terlibat (*not involved*), tidak ada pengetahuan atau kepentingan dalam sistem politik domestik (*no knowledge or interest in the domestic political system*); (2) Subyek (*Subject*) sudah agak sadar akan keberadaan lembaga politik dan aturan-aturannya (*somewhat aware of political institution and rules*); (3) Partisipasi (*Participant*) yaitu memiliki pengaruh yang kuat, kompeten dan percaya diri dalam memahami sistem politik.

Perkembangan budaya politik suatu masyarakat dipengaruhi oleh kompleksitas

nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri (Zuhro, 2009 : 33). Oleh sebab itu, dalam kehidupan masyarakat selalu dilandasi oleh interaksi antar nilai yang mendorong timbulnya hubungan-hubungan di antara budaya politik dalam suatu kelompok masyarakat. Interaksi antar nilai-nilai dalam masyarakat tersebut mendorong munculnya proses demokratisasi, sehingga dalam setiap pemecahan selalu didasarkan pada musyawarah mufakat.

## 3. Elit Politik

Munculnya istilah elit politik adalah hasil dari diskusi para ilmuwan seperti Schumpeter, Lasswell, C. Wright Mills yang mengamati berbagai tulisan yang pernah ditulis oleh para ahli terdahulu dari Eropa seperti Vilfredo Pareto, Gaetano, Roberto Michels, Jose Ortega Y. Gasset. Bahkan Pareto percaya bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik penuh (Varma, 2007 : 200). Dari pemahaman tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok kecil yang terdiri dari orang-orang yang berkualitas yang menduduki berbagai jabatan dalam masyarakat yang disebut Pareto sebagai

elit yang memerintah (*governing elite*) dan kelompok masyarakat besar (umum) yaitu masyarakat menengah kebawah yang mempunyai jumlah yang banyak (*non-governing elite*).

Kelompok elit yang memerintah (*the governing elite*) dibedakan lagi dari tokoh yang termasuk dalam tokoh yang berkuasa (*the ruling class*) mencakup petinggi birokrasi pemerintahan yang sedang berkuasa, dan kelompok elit strategis (*strategic elites*) mencakup pengusaha, pemimpin parpol, pemimpin agama, dan pemimpin organisasi sosial yang mempunyai pengaruh di bidang ekonomi, politik, agama, ilmu pengetahuan, komunikasi massa (Jurdi, 2004 : 30). Hal senada diungkapkan oleh Gaetano Mosca dalam Varma (2007 : 202 – 203) bahwa dalam semua masyarakat, dari yang paling giat mengembangkan diri serta telah mencapai fajar peradaban, hingga pada masyarakat yang paling maju dan kuat, selalu muncul dua kelas dalam masyarakat yaitu kelas yang memerintah yang jumlahnya lebih sedikit tetapi memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan, kemudian kelas yang diperintah yang jumlahnya lebih besar namun selalu dikontrol oleh masyarakat yang jumlahnya kecil.

Sejak reformasi politik tahun 1997 di Indonesia yang diperkuat dengan adanya pelimpahan kewenangan pusat ke Daerah (otonomi), memunculkan situasi baru bagi sistim perpolitikan di Indonesia. Sistim multi partai yang diberlakukan pemerintah membuka peluang bagi elit-elit politik baru untuk ikut bersaing dengan elit-elit politik senior yang ada. Posisi elit di Toraja selama ini dipegang oleh kaum bangsawan yang biasa disebut *Puang* dan *Toparengé*. *Puang* atau setara dengan Raja di daerah lain yang dijadikan simbol kepemimpinan karena kekayaannya. Sementara *Toparengé* lebih berfungsi sebagai pemimpin masyarakat. Peranan kaum bangsawan selama ini selalu dominan dalam segala kegiatan kemasyarakatan.

#### • Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun data yang digunakan adalah data primer maupun sekunder. Data primer dapat berupa manuskrip, notulen-notulen rapat, catatan pribadi, serta wawancara mendalam dengan sejumlah responden yaitu tokoh agama, tokoh adat, tokoh politik, pakar pendidikan (akademisi), dan masyarakat umum. Sementara data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, berupa buku-

buku, majalah, disertasi, tesis, jurnal ilmiah, monograf, koran yang memuat pembahasan dalam kajian ini.

- **Budaya Toraja dan Perkembangannya**

Ditinjau dari perspektif historis, kepercayaan lama (*aluk todolo*) dan segala aturannya mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman. Kemajuan di bidang pendidikan, teknologi, dan informasi, banyak mengikis nilai-nilai budaya lama yang tidak sejalan dengan perkembangan moderen. Bila disimak dari cerita rakyat sebagaimana diceritakan oleh Puang Gau' Lembang dalam Palebangan (2007) mengatakan bahwa nenek moyang orang Toraja datang di dalam tiga gelombang yaitu: (1) gelombang pertama, disebut *To Sama'* diturunkan di negeri Tiangka' (Sangalla'). Rombongan ini dikenal dengan *tana' karurung* (tongkat enaung) yang diambil dari pohon ijuk karena pada saat itu belum ada besi dan emas; (2) gelombang ke dua, disebut *To makaka* diturunkan di Marinding. Kelompok ini adalah penganjur *aluk* (agama) dan dikenal sebagai *tana' bassi* (tongkat besi) karena pada saat itu sudah ada besi namun belum ada emas, (3) gelombang ke tiga, disebut *To matasak* diturunkan di Kandora (Sangalla') dan

dikenal sebagai *tana' bulaan* (tongkat emas) karena pada saat itu sudah ada emas dan merekalah yang membawanya (Palebangan, 2007 : 69-70).

Makna budaya bagi masyarakat Toraja adalah sebagai identitas untuk mengekspresikan tentang jati dirinya, perasaannya, dan kehidupan sosialnya, serta agamanya terutama dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh sebab itu hubungan kekeluargaan atau kekerabatan masyarakat Toraja dikenal sangat baik, dan terpelihara secara turun temurun. Hal ini dapat dirasakan dari berbagai ungkapan yang halus bila lewat di samping rumah dengan kata "*manasumo raka*" (arti harpiahnya adalah apakah sudah masak?) yang dijawab oleh orang dalam rumah "*io manasumo ta lendu' opa* (ya sudah masak, mari mampir).

Budaya kekeluargaan yang terbina sejak dari nenek moyang mereka, menggambarkan bahwa masyarakat Toraja sangat menghargai kebersamaan dan memupuk semangat gotong royong serta menghargai perbedaan untuk memperkuat persatuan (*unity in difference*). Secara umum *aluk* dibagi dalam dua kelompok besar yaitu ritus pesta adat (*rambu tuka'*) dan ritus upacara penguburan (*rambu solo'*). Adat ini biasa disebut dengan upacara yang berpasangan dan bertingkat-

tingkat yang teratur mulai dari bawah sampai ke puncaknya (*aluk simuane tallang, silau' eran*) (Tangdilintin, 1985 : 15).

#### a. Ritus Pesta Adat (*Rambu Tuka'*)

Sesuai dengan ajaran *Aluk To dolo* (kepercayaan lama) bahwa pesta adat (*rambu tuka'*) biasanya dilaksanakan sebagai ungkapan syukur kepada dewa-dewa atau leluhur yang didewakan atas segala keberhasilan manusia dalam menjalani kehidupan baik atas berkat, kesehatan, pendidikan, maupun hasil usaha. Ada berbagai jenis dan ragam pesta adat yang dilakukan masyarakat, di antaranya adalah *ma'rara banua* (pesta pentabisan rumah adat), *merok* (ucapan syukur atas selesainya rumah adat yang bangun baru atau direnovasi). *Rambu tuka'* artinya asap yang naik ke atas menuju langit di sebelah timur laut (*aluk rampe matallo*) yang ditempati oleh para dewa. Ada berbagai jenis dan ragam pesta adat yang dilakukan masyarakat (namun tidak dijelaskan semua disini).

#### b. Upacara Penguburan (*Rambu Solo'*)

Upacara penguburan (*rambu solo'*) yaitu upacara yang dilaksanakan berkaitan dengan orang yang meninggal dan akan dikubur. *Rambu solo'* berarti asap yang

menurun (*aluk rampe matampuk*). Upacara penguburan adalah satu bentuk adat yang diwariskan dari leluhur secara turun temurun dan merupakan penghormatan terakhir bagi yang telah meninggal.

#### Strata Sosial Masyarakat

Implementasi dari budaya Toraja yang dimanifestasikan dalam bentuk adat istiadat tidak lepas dari pengelompokan masyarakat berdasarkan atas status sosialnya. Strata sosial dalam masyarakat Toraja terbagi dalam empat tingkatan strata yaitu (1) Strata sosial yang paling tinggi disebut dengan *Tana' Bulaan atau tongkat emas* (kelompok bangsawan atau Puang); (2) Strata sosial yang kedua disebut dengan *Tana' Bassi atau tongkat besi* (kelompok bangsawan menengah); (3) Strata sosial yang ketiga disebut dengan *Tana' Karurung atau tongkat rujung enau* (kelompok umum atau masyarakat biasa); Strata sosial yang paling rendah disebut dengan *Tana' Kua-kua atau tongkat gelagah* (kelompok budak).

Dalam perkembangannya, sejak memasuki abad ke- 20, lapisan masyarakat bawah (budak) di Toraja yang disebut dengan istilah *kaunan* mulai dihapuskan, karena larangan dari pemerintah kolonial dan desakan dari agama yang memandang semua manusia sama dan sederajat.



## PEMBAHASAN

### • Pemanfaatan Budaya sebagai Pranata Politik

Ada berbagai instrumen yang dimanfaatkan oleh elit-elit politik lokal memenangkan kompetisi di antaranya adalah memanfaatkan budaya lokal. Budaya khususnya pelaksanaan pesta adat dan upacara penguburan telah dimanfaatkan oleh elit-elit lokal untuk mempengaruhi masyarakat melalui bantuan yang bersifat politis. Bantuan politis yang diberikan kepada masyarakat tidak disadari bahwa sifat bantuan ini adalah ikatan moral yang diinvestasikan oleh elit-elit lokal dalam mewujudkan tujuan politiknya yaitu menjadi pemimpin masyarakat atau untuk menduduki posisi puncak bukan hanya dalam masyarakat tetapi juga dalam pemerintahan.

Motif lain dari pemanfaatan budaya ini adalah meningkatkan citra diri atau prestise melalui ritual adat istiadat. Pengorbanan hewan melampaui ketentuan adat dan strata sosial dalam masyarakat adalah salah satu bentuk manipulasi budaya yang dilakukan oknum masyarakat tanpa masyarakat menyadari bahwa ritual-ritual yang dilaksanakan telah berubah. Pada dasarnya yang banyak melakukan perubahan bentuk adat di Toraja adalah orang-orang yang mapan secara ekonomi

(orang kaya baru) atau masyarakat yang sudah berhasil di rantau dan kembali ke Toraja memperlihatkan keberhasilannya dalam bentuk pesta adat atau upacara penguburan.

Kondisi demikian menggambarkan bahwa elit-elit politik lokal menjadikan budaya sebagai mesin produksi untuk mencari keuntungan dengan penuh perhitungan. Jumlah uang yang diinvestasikan atau disumbangkan kepada masyarakat melalui pesta adat dan upacara penguburan ataupun ke rumah ibadah diharapkan akan mendapatkan sejumlah pengikut yang dapat dipengaruhi untuk memilih pasangan kandidat sesuai dengan arahan elit-elit politik. Kendatipun elit-elit sudah memberikan sumbangan atau bantuan, tidak ada jaminan bahwa semua masyarakat yang dibantu baik secara pribadi maupun secara bersama melalui rumah Ibadah dapat memberikan suaranya kepada calon yang disodorkan oleh elit-elit politik.

Masyarakat sebagai objek dari elit-elit politik lokal semakin terjepit oleh berbagai tekanan yang dilakukan oleh aktor-aktor di lapangan. Masyarakat tidak lagi berfikir secara rasional tentang kualitas dalam memilih calon pemimpin, tetapi mereka lebih memilih calon yang dapat memberikan bantuan yang tertinggi.

Semua bantuan yang diberikan oleh siapapun (aktor atau elit-elit) akan diterima karena pada umumnya masyarakat mengatakan kami tidak menolak setiap bantuan yang diberikan sepanjang kami tidak meminta. Faktor utamanya adalah calon pemimpin telah memberikan bayaran lebih tinggi dan sebagai balas jasanya masyarakat akan mendukungnya.

**a. Pesta Adat (*Rambu tuka'*) dan Upacara Penguburan (*Rambu solo'*) sebagai Alat Politik.**

Budaya Toraja khususnya pada pelaksanaan pesta adat (*rambu tuka'*) dan upacara penguburan (*rambu solo'*) dipandang oleh sebagian besar orang luar Toraja sebagai suatu pemborosan secara ekonomi. Hal ini disebabkan karena jumlah uang yang diinvestasikan dalam pelaksanaan pesta adat ataupun upacara penguburan sangat besar.

Pada era moderen saat ini justru budaya khususnya pesta adat dan upacara penguburan banyak dimanipulasi oleh masyarakat Toraja yang berpendidikan menengah ke atas dan secara ekonomi telah berhasil dalam kehidupannya. Budaya ini juga dimanfaatkan untuk mencari bentuk identitas diri baru atau berkompetisi dalam memperebutkan kepemimpinan dalam masyarakat.

Modifikasi budaya Toraja khususnya dalam pesta adat dan upacara penguburan tanpa diasadari oleh masyarakat dilakukan dalam bentuk pesta adat atau upacara penguburan yang meriah, sehingga yang nampak kelihatan adalah kekaguman masyarakat akan pestanya bukan kedukaannya. Disini jelas terjadi perubahan pola dalam implementasinya yang tidak sesuai dengan norma-norma adat yang duluhnya merupakan aturan yang tidak tertulis namun disepakati secara turun temurun.

Makin meriah ritual yang dilaksanakan, makin diakui oleh masyarakat sebagai orang kaya baru. Politik akhirnya masuk juga seperti nampak dalam pemilihan kepemimpinan. Orang-orang kaya baru bersaing dalam mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan cara melaksanakan upacara penguburan secara besar-besaran. Saat ini, upacara penguburan (*rambu solo'*) tidak lagi mengenal strata sosial dalam masyarakat (bangsawan tertinggi, bangsawan menengah, masyarakat umum, budak) tetapi siapapun yang mampu secara finansial dapat melakukan upacara penguburan (*rambu solo'*) secara meriah dan jumlah hewan kurban (kerbau dan babi) tidak terbatas jumlahnya.

Upacara yang meriah seperti ini, sering dimanfaatkan oleh elit-elit lokal untuk ikut aktif dalam pelaksanaan upacara atau memberikan sumbangan besar bagi keluarga dalam bentuk hewan atau uang. Bahkan tidak sedikit dari elit-elit politik mengambil peran dalam kepanitiaan dan melakukan pendekatan-pendekatan dengan caranya sendiri untuk mempengaruhi masyarakat sekaligus menyampaikan berbagai pesan. Secara tidak langsung, elit politik tersebut telah mengikat keluarga untuk memilih pada saat pemilihan kepemimpinan dilaksanakan. Dengan demikian budaya ritus pesta adat dan ritus upacara penguburan telah dipolitisir atau dimanfaatkan sebagai salah satu alat untuk mewujudkan salah satu tujuan politiknya.

#### **b. Pemanfaatan Rumah Ibadah Sebagai Instrumen Politik.**

Rumah ibadah seperti Gereja, Masjid, atau Vihara adalah tempat suci dan sakral bagi pemeluk agama untuk ditempati sebagai tempat pemujaan kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan masyarakat. Rumah ibadah seharusnya bebas dari kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan ajaran agama termasuk kegiatan politik praktis. Akan tetapi para aktor atau elit memandang bahwa rumah ibadah adalah tempat massa

berkumpul untuk menjalankan ibadahnya. Aktor atau elit juga adalah bagian dari anggota jemaah dalam rumah ibadah tersebut. Cara yang digunakan oleh elit-elit lokal adalah dengan memberikan bantuan ke rumah-rumah Ibadah dalam bentuk uang atau barang (*public goods*). Pada umumnya sumbangan dari elit-elit politik ke rumah Ibadah lebih banyak dan lebih besar menjelang pemilihan Legislatif atau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Sumbangan yang diberikan itu harus diumumkan dalam rumah Ibadah tentang bentuk dan jumlah sumbangan serta nama penyumbang. Bila sumbangan itu tidak diumumkan dalam rumah ibadah, maka elit-elit politik atau aktor lapangan protes ke tokoh-tokoh agama.

Berbagai sumbangan yang diberikan oleh elit-elit politik ke rumah Ibadah menjelang dimulainya kompetisi pemilihan anggota Legislatif atau Bupati dan Wakil Bupati menunjukkan bahwa elit-elit politik memandang rumah Ibadah sebagai salah satu sumber suara potensial yang dibutuhkan dalam kompetisi pemilihan kepemimpinan. Hal ini dapat dipahami karena rumah Ibadah adalah tempat massa berkumpul dan dapat dimobilisasi melalui tokoh-tokoh agama. Dalam hal ini masyarakat sebagai objek politik dari elit-

elit politik diikat secara moral dalam tiga bentuk yaitu:

*Pertama*, masyarakat sebagai anggota jemaat, telah mendapat sumbangan dari elit-elit politik untuk digunakan dalam membangun atau merenovasi rumah ibadah (investasi terselubung). *Kedua*, jemaat bila kembali ke tengah-tengah keluarga, mendapat bantuan keuangan langsung dari elit-elit politik (dibayar) agar memberikan suara pilihannya kepada yang memberi sumbangan. *Ketiga*, anggota jemaat sebagai bagian dari komunitas umum mendapat bantuan dari elit-elit politik untuk pembangunan desa atau kota. Semua jenis bantuan ini secara politis mengikat masyarakat untuk memberikan suaranya kepada calon pemimpin tersebut pada pemilihan kepemimpinan yang akan dilaksanakan.

### c. Pemanfaatan Simbol Budaya sebagai Instrumen Politik

Salah satu simbol budaya yang sering digunakan sebagai alat politik oleh elit-elit politik lokal adalah rumah adat (*Tongkonan*). Dulunya *Tongkonan* dibentuk pada waktu penguasa-penguasa dari luar Toraja menguasai daerah dan menduduki Tana Toraja serta menentukan tempat tinggalnya atau rumahnya sebagai tempat memberi perintah kepada

masyarakat yang dikuasainya. Begitu juga masyarakat yang dikuasainya, datang dan duduk mendengar serta duduk menyelesaikan masalah mereka itu di tempat penguasa itu tinggal (Tangdilintin, 1985 : 47).

Secara umum *Tongkonan* dapat berfungsi sebagai tempat berkumpul dan mendengarkan penerangan/perintah adat dari pemangku adat di *Tongkonan* itu serta tempat melaksanakan ritual pesta adat dan upacara penguburan. Masyarakat kelas menengah ke atas bila meninggal, biasanya disimpan dalam rumah adat menunggu keluarganya untuk berkumpul dan memutuskan waktu yang tepat untuk melaksanakan ritus penguburan.

Rumah adat (*tongkonan*) sering dimanfaatkan sebagai tempat kampanye secara terselubung melalui syukuran yang dilaksanakan oleh elit-elit politik menjelang pemilihan Legislatif atau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pesta yang dilangsungkan calon atau tokoh politik di *tongkonan* tersebut tidak memungut biaya dari anggota keluarga lainnya, namun semuanya ditanggung oleh calon atau tokoh politik itu sendiri. Karena semua biaya ditanggung sendiri, maka segala tata cara dan aturan juga ditentukan oleh calon atau tokoh politik itu sendiri. Masyarakat diundang untuk hadir dan

menikmati makanan sambil mendengarkan pesan-pesan calon atau tokoh tersebut. Aktor atau elit lokal juga melakukan pendekatan ke masyarakat dengan cara menelusuri silsilah keluarga dari rumah adat tersebut.

- **Pemekaran Sebagai Perwujudan Tujuan Politik**

Pemekaran Tana Toraja diawali dari berbagai pertentangan politik oleh elit-elit politik yang pro pemekaran dan yang kontra pemekaran. Elit-elit yang pro pemekaran dengan giat melakukan lobi-lobi politik dan berbagai pendekatan secara intensif kepada masyarakat untuk melakukan sosialisasi tentang alasan pemekaran.

Elit-elit lokal yang tergabung dalam pro pemekaran memandang bahwa pemekaran daerah adalah solusi terbaik dalam mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Belajar dari kegagalan pembentukan Provinsi Luwu Raya (Luwu Toraja) karena adanya perbedaan kepentingan politik oleh elit-elit politik dan perbedaan budaya. Kekhawatiran sekelompok masyarakat Luwu akan terjadinya perubahan budaya bila bergabung dengan Toraja dalam suatu Provinsi adalah hal yang menjadi perhatian oleh elit-elit lokal di Toraja.

Kekhawatiran sebagian masyarakat akan terjadinya perpecahan baik budaya maupun persatuan dan kesatuan masyarakat adalah hal yang wajar. Pemekaran akan memperkuat pendikotomian antara masyarakat bagian Utara dan masyarakat di bagian Selatan bahkan dapat menimbulkan sentimen kedaerahan. Dengan demikian sebutan "*Tondok Lembangan Bulan Tana Matari' Allo*" (masyarakat yang terbingkai dalam suatu kebulatan hidup bersama yang diikat oleh semangat persatuan dan kesatuan yang kokoh dan damai di bawah sorotan sinar matahari) hanyalah merupakan simbol bahwa masyarakat Toraja pernah bersatu padu. Hal lain yang dikhawatirkan oleh masyarakat yang kontra pemekaran adalah munculnya koruptor-koruptor baru di daerah karena dalam proses pemilukada tidak sedikit modal yang dihabiskan oleh pemangku jabatan dalam memperebutkan posisi puncak.

Pro dan kontra terhadap pemekaran di Toraja adalah merupakan bagian dari dinamika sistem demokratisasi yang sudah berjalan baik dalam masyarakat. Masyarakat yang tidak setuju dengan pemekaran sudah dapat mengekspresikan penolakannya secara langsung melalui berbagai argumen yang rasional. Begitu juga dengan masyarakat yang menginginkan pemekaran memandang

bahwa pemekaran ini sangat penting untuk kemajuan masyarakat.

### KESIMPULAN

Masyarakat Toraja memaknai budaya khususnya ritus pesta adat (*rambu tuka'*) dan ritus upacara penguburan (*rambu solo'*) sebagai wujud pengabdian dan rasa cinta kasih oleh anak cucu terhadap orang tua yang meninggal dunia. Ritual seperti ini merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan Masyarakat Toraja. Salah satu faktor yang memotivasi masyarakat Toraja untuk bekerja keras dan mengumpulkan uang lebih banyak di luar Toraja (di rantau) adalah karena adanya ritual pesta adat (*rambu tuka'*) dan ritual upacara penguburan (*rambu solo'*). Besarnya biaya yang harus disiapkan oleh keluarga dalam melaksanakan pesta adat atau upacara penguburan, sehingga membutuhkan waktu yang panjang untuk mencari dan mengumpulkan modal hingga mencukupi kebutuhan pelaksanaan ritual tersebut.

Meningkatnya pengetahuan, ekonomi, dan politik masyarakat, maka dalam pelaksanaan ritual pesta adat (*rambu tuka'*) maupun upacara penguburan (*rambu solo'*) juga mengalami perubahan. Bahkan budaya Toraja khususnya pesta adat dan upacara penguburan telah digunakan oleh

elit-elit politik lokal untuk tujuan politik baik untuk mencari identitas diri atau prestise keluarga, maupun untuk mendapatkan posisi kepemimpinan dalam masyarakat.

Pada umumnya elit-elit politik menggunakan berbagai cara untuk memanipulasi budaya dalam mewujudkan ambisi pribadi atau kelompoknya sebagai figur yang patut dijadikan teladan oleh masyarakat. Akibatnya budaya tidak lagi mencerminkan kemurnian dan kesakralan terutama pada ritus upacara penguburan (*rambu solo'*) sebagai bentuk wujud cinta kasih dan pengabdian anak cucu kepada orang tuanya yang telah meninggal. Bahkan budaya dan politik sudah sulit dipisahkan, karena dalam kegiatan politik selalu memanfaatkan budaya untuk mewujudkan tujuannya.

Begitu juga dalam pemanfaatan rumah Ibadah (Gereja dan Mesjid) untuk tujuan politik, para tokoh agama menyayangkan perilaku berpolitik oleh elit-elit politik yang berlindung dalam Ibadah, karena sambil beribadah juga mereka menjalankan kegiatan politiknya baik melalui sumbangan langsung maupun dengan meminta waktu untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya dalam rumah Ibadah. Hal ini menggugah keprihatinan dari berbagai kalangan baik dari tokoh

masyarakat maupun dari pakar pendidikan bahwa budaya seharusnya terpisah dari kegiatan politik. Salah satu wujud dari perjuangan politik oleh elit-elit lokal di Kabupaten Tana Toraja adalah pemekaran Kabupaten Toraja Utara, yang dalam prosesnya penuh diwarnai manipulasi budaya setempat oleh elit-elit yang bersaing.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2007. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Almond A., Gabriel, dan Verba, Sydney. 1990. *Budaya Politik: Tingkah laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Amal, Ichlasul dan Armawi, Armaidly. 1995. *Sumbangan Ilmu Sosial terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta Jakarta.
- Bararuallo, Frans. 2010. *Kebudayaan Toraja, Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Mendatang*, Universitas Atma Jaya Jakarta.
- Beilharz, Peter. 2005. *Teori-Teori Sosial*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Buehler, Michael and Tan, Paige. 2007. *Party-Candidate Relationships in Indonesian Local Politics ( a case study of the 2005 Regional Elections in Gowa, South Sulawesi)*.
- Dera, M., Yasi et al. 1996. *Aluk Rambu Solo' dan Persepsi Orang Kristen Terhadap Rambu Solo'*, Pusbang Gereja Toraja Tana Toraja.
- Greetz, Clifford. 1995. *Kebudayaan dan Agama, Refleksi Budaya* Kanisius, Yogyakarta.
- Huntington, P., Samuel. 2004. *Tertib Politik Pada Masyarakat yang sedang berkembang* (Edisi Indonesia), RjaGrafindo Jakarta.
- Ihromi, T.O. 1984. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Gramedi, Jakarta.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada (GP Press Jakarta.
- Kalua, R. Adrial, dkk. 2010. *Sejarah, Adat, dan Budaya Toraja di Tallu Lembangna*, Tallu Lembangna, Tana Toraja.
- Koentjaraningrat. 2007. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Kobong, Theodorus. 2002. *Injil dan Tongkonan*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, et al. 1992. *Aluk, Adat dan Kebudayaan Toraja dalam Perjumpaan dengan Injil*, Pusbang Gereja Toraja. Tana Toraja.
- Nordholt, H. Sculte dan Klinken, Van Gery. 2009. *Politik Lokal di*

- Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Palebangan, B., Frans. 2007. *Aluk, Adat, dan Adat-Istiadat Toraja*, Sulo Rantepao, Tana Toraja.
- Pasanda, A., Arrang. 1995. *Pongtiku Pahlawan Tana Toraja, Pejuang Anti Kolonialisme Belanda 1905-1907*, Fajar Baru Sinarpratama, Tana Toraja.
- Raru, G.G. dkk. 2009. *Rekam Jejak Pembentukan Kabupaten Toraja Utara*, Pemda Tana Toraja.
- Rodee, C., Carlton, dkk. 2009. *Pengantar Ilmu Politik*, RajaGrafindo Persada Jakarta.
- Soeaidy, Saleh, M. 2007. *Otonomi Daerah dan Resolusi Konflik Pusat-Daerah; dalam Desentralisasi dan Otonomi daerah*, LIPI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat*, Ghalia Indonesia.
- Sudarsono, Juwono dan Ruwiyanto, Wahyudi. 1999. *Reformasi Sosial Budaya dan Era Globalisasi (Bunga Rampai)*, Wacha Widia Perdana, Jakarta.
- Susanto, S., Astrid. 1983. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Binacipta Jakarta.
- Syaukani., Gaffar, Afan dan Rasyid, M., Ryaas. 2009, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Tangdilintin, L.T. 1985. *Tongkonan (Rumah Adat) Arsitektur & Ragam Hias Toraja*, Yayasan Lepogan Bulan (YALBU), Tana Toraja.
- Zuro, R., Siti dan Kawan-Kawan. 2009. *Demokrasi Lokal, Perubahan dan Kestinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal*, di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali Ombak, Yogyakarta.
- . 2011. *Model Demokrasi lokal, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali*, THC Mandiri Jakarta.